



Sengketa Pilkada Kota Jogja Segera Digelar

JOGJA, BERNAS -- Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPP PDI Perjuangan telah menyempurnakan material formal untuk gugatan sengketa pilkada Kota Yogyakarta. Penyempurnaan material formal ini juga telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

"Penyempurnaan gugatan material formal telah diterima dengan baik. Menurut rencana, sidang awal tanggal 16 Maret 2017," kata Fokki Ardiyanto,

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPC PDI Perjuangan Kota Yogyakarta dalam rilis yang diterima Bernas, Kamis (9/3).

Fokki menerangkan, sesuai dengan keterangan Mahkamah Konstitusi, gugatan perkara perselisihan pilkada untuk Kota Yogyakarta masuk pada hari

ketiga, yaitu pada Senin (27/2).

Selain Kota Yogyakarta, gugatan yang masuk pada hari yang sama adalah dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Singkil,

► ke hal 7

Sengketa Pilkada

Kabupaten Sorong, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Buton Selatan, Kota Langsa, Kota Sorong, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Buru, dan dua perkara dari Kabupaten Sarmi.

Fokki menjelaskan, total ada 49 perkara yang masuk ke Mahkamah Konstitusi selama pendaftaran permohonan perkara sengketa Pilkada sejak 22 Februari lalu. "Ada 32 anggota tim BBHA DPP PDI Perjuangan yang bekerja dalam advokasi gugatan perselisihan pilkada ke Mah-

kamah Konstitusi," katanya.

Siap hadapi

Tim hukum paslon Haryadi-Heroe, menyatakan siap menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK). Anggota Tim Advokasi, Sahlan Adi Putra Alboneh SH MH, dalam pernyataan sikapnya, Kamis (9/3), mengaku akan mengajukan alat atau dokumen bukti sesuai Peraturan MK nomor 1 tahun 2016 jo 1 tahun 2017. "Kami akan berikan keterangan kepada MK sesuai aturan yang berlaku, baik dalam sidang panel atau

sidang pleno," ujarnya.

Sahlan menjelaskan, peraturan MK No.1/2016 jo 1 tahun 2017 menyebutkan terdapat tiga pihak yang saling berkaitan yaitu pemohon, termohon dan para pihak terkait. Dalam hal ini pihak pemohon adalah tim paslon Imam-Fadli, adapun termohonnya adalah KPU Kota Yogyakarta. Sedangkan posisi paslon Haryadi-Heroe yang merupakan peraih suara terbanyak hasil rekapitulasi KPU Kota Yogyakarta, sebagai salah satu pihak terkait.

Sambungan dari hal 1

Seperti diketahui, hasil rekapitulasi berjenjang yang diumumkan KPU Kota Yogyakarta, paslon Haryadi-Heroe meraih 100.333 suara, dan paslon Imam-Fadli meraih 99.146 suara.

Sahlan melihat proses penghitungan suara Pilwalkot sudah sesuai prosedur. Lembaga pelaksana pemilu, baik KPU Kota Yogyakarta serta Panwas, telah menjalankan kerjanya dengan profesional. "Mereka sudah bertugas sesuai ketentuan secara profesional," ujarnya. Kedua le-

mbaga itu tersebut dinilai tidak melakukan pelanggaran aturan yang berakibat mempengaruhi perolehan suara dari dua paslon yang bersaing. Karena itu ia berharap masyarakat bisa menangkap dan menilai dinamika yang berkembang pasca Pilwalkot.

"Masyarakat Jogja itu masyarakat cerdas, tidak mudah terprovokasi. Karena itu, meskipun mereka diam, mereka sesungguhnya sudah menangkap hal yang sebenarnya terjadi," katanya.

(m3/age)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sekretariat Komisi Pemilihan U	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sekretariat Panwaslu (Bawaslu)			

Yogyakarta, 07 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005